

**DIPLOMASI INDONESIA DAN KOREA SELATAN DI BIDANG
KERJASAMA PERTAHANAN TAHUN 2008-2014**

Oleh: Muthia Zulkarnain

Email: muthiazulkarnain@gmail.com

Pembimbing Afrizal S.IP MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

This research describe the diplomacy of Indonesia with South Korea in defence and security. Asia Pacisif are one of region in the world that have strategic potency espcecially about the interest of the superpower states likes United State of America and China. In order that to increase a power in defence scope, so Indonesia have make a agreement with South Korea to create some cooperations for the another states.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the diplomacy of Indonesia with South Korea in defence and security. The theories applied in this research are realism with the nations state analyze, national interest concept and the diplomacy setting theory.

The research shows that the diplomacy of Indonesia with South Korea in defence and security are have done by create a confidence building measures. The implementations of this policy are have done by cooperations in military and defence between Indonesia and South Korea. The cooperations between Indonesia and South Korea area have done because the domestic and internationals threat.

Key words: *diplomacy, agreements, military and defence.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian diplomasi keamanan yang menganalisis tentang diplomasi Indonesia dengan Korea Selatan dibidang kerjasama pertahanan tahun 2008-2014. Permasalahan keamanan sampai dengan saat sekarang ini masih menjadi fokus utama dalam kajian ilmu hubungan internasional, walaupun kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara berkembang dengan pesat. Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi mendorong masyarakat internasional untuk saling meningkatkan hubungan di segala bidang, dengan menjalin kerja sama antar negara, baik bilateral maupun multilateral.

Stabilitas kawasan merupakan kepentingan bersama bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Terjaganya stabilitas kawasan akan memberikan keuntungan bagi semua negara kawasan, baik dari aspek politik, ekonomi maupun keamanan. Oleh karena itu, negara-negara di kawasan senantiasa berupaya menjaga stabilitas keamanan yang telah dinikmati pasca Perang Dingin. Bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara, stabilitas keamanan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Kawasan Asia Tenggara kini menghadapi tantangan terhadap stabilitas kawasan dalam beragam sumber, satu di antaranya adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan.

Pemerintah China berharap Amerika Serikat dan Filipina dapat lebih berkontribusi dalam

menciptakan situasi yang kondusif di kawasan khususnya di Laut China Selatan. Kementerian Luar Negeri China dalam keterangan persnya di Beijing mengatakan bahwa, China berharap kedua pihak dapat memberikan kontribusi bagi situasi yang kondusif di kawasan dengan menjaga perdamaian dan stabilitas dilandasi rasa saling percaya.¹ Oleh karena itu diperlukan diplomasi pertahanan dalam hubungan antar bangsa untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan dalam menghadapi permasalahan yang ada agar eskalasi tidak meningkat kearah konflik. Peran aktif kerjasama pertahanan Indonesia dikawasan Asia Tenggara sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas kawasan.

Korea Selatan telah menjadi salah satu mitra Indonesia dalam pembangunan kapabilitas pertahanan dan peningkatan profesionalitas prajurit TNI. Dalam kaitan tersebut Indonesia dan Korea Selatan telah menyepakati kerja sama kegiatan di bidang pertahanan, antara lain melalui nota kesepahaman dan perjanjian di bidang logistik, kerja sama industri serta barang dan jasa untuk kepentingan pertahanan. Indonesia dan Korea Selatan juga telah lama mengembangkan kerja sama pendidikan, antara lain pertukaran perwira untuk mengikuti pendidikan pengembangan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif *realis*. Asumsi dari *perspektif realis* memfokuskan perhatian pada sebuah

¹

http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_v.htm diakses pada tanggal 15 Mei 2017 Pukul 05.00 WIB

negara. Negara merupakan aktor yang paling berperan dalam sistem internasional dan relatif memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan yang diambil.² Penggunaan tingkat analisa ini lebih berkonsentrasi pada apa yang dilakukan negara serta bagaimana negara memutuskan untuk mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasional. Menurut perspektif realis, negara merupakan aktor utama di dalam studi Hubungan Internasional.

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepentingan nasional. Menurut Donald E. Nuchterlain mengemukakan kepentingan sebagai kebutuhan yang dirasakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain yang merupakan lingkungan eksternalnya.³ Kepentingan nasional inilah yang memberikan kontribusi yang besar bagi pembentukan pandangan-pandangan keluar bagi suatu bangsa. Kepentingan nasional menurut Donald E. Nuchterlain terbagi atas empat poin, yaitu:

1. *Defense Interest:* Kepentingan untuk melindungi negara atau rakyat dari ancaman fisik dari negara lain atau perlindungan ancaman terhadap sistem suatu Negara.
2. *Economic Interest:* Kepentingan ekonomi yang

²Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 1990

³ Donald E. Nuchterlain. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring). 1979, hlm 57

berupa tambahan nilai secara ekonomi dalam hubungannya dengan negara lain dimana hubungan perdagangan yang dilakukan dengan negara lain akan memberikan keuntungan.

3. *World Order Interest:* Kepentingan tata dunia dengan adanya jaminan pemeliharaan terhadap sistem politik dan ekonomi internasional dimana suatu negara dapat merasakan keamanan sehingga rakyat dan badan usahanya dapat beroperasi diluar batas Negara dengan aman.
4. *Ideological Interest:* Kepentingan ideologi dengan perlindungan terhadap serangkaian nilai-nilai tertentu yang dapat dipercaya dan dapat dipegang masyarakat dari suatu negara yang berdaulat.⁴

Berdasarkan pendapat Donald E. Nuchterlain, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam kerjasama dibidang pertahanan dengan Korea Selatan tahun 2008-2014 adalah untuk mengamankan kepentingan nasional dibidang keamanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diplomasi. Menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya *Guide to Diplomatic Practice* mengatakan bahwa diplomasi merupakan penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah dengan negara-negara berdaulat.⁵ Selain itu

⁴ *Ibid.*

⁵ Earnest Satow Sir. *Guide to Diplomatic Practice*. Dalam buku S.L Roy. *Diplomasi*.

pandangan ahli mengenai diplomasi, yaitu:

”Diplomasi pada dasarnya adalah usaha untuk meyakinkan pihak lain atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita dan jika mungkin mendukung pandangan kita itu, tanpa perlu menggunakan kekerasan”.⁶

Menurut KM Panikkar dalam bukunya yang berjudul *The Principle of Diplomacy*, maka diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional merupakan seni dalam mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain,⁷ yang dalam hal ini merupakan kepentingan nasional suatu negara dalam dunia internasional, namun oleh sebagian pandangan diplomasi lebih menekankan terhadap negosiasi–negosiasi perjanjian atau sebagai posisi tawar-menawar dengan negara lain.

Diplomasi sangat erat dengan penyelesaian permasalahan–permasalahan yang dilakukan dengan cara–cara damai, tetapi apabila cara–cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan–tujuannya.⁸ Sehingga dapat dikatakan bahwa perang juga merupakan salah satu sarana dalam diplomasi di dunia

internasional. S.L. Roy, mengkaji hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai definisi mengenai diplomasi. Menurutnya dari definisi-definisi tersebut beberapa hal tampak jelas, bahwa:

1. Unsur pokok diplomasi adalah negoisasi,
2. Negoisasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara,
3. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga serta memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin dan dilaksanakan secara damai, pemeliharaan perdamaian dengan tanpa merusak kepentingan nasional merupakan tujuan utama diplomasi,
4. Teknik-teknik diplomasi yang sering dipakai untuk mempersiapkan perang bukan untuk menghasilkan perdamaian,
5. Diplomasi berhubungan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara,
6. Diplomasi modern berhubungan erat dengan sistem negara,
7. Diplomasi tidak bisa dipisahkan dari perwakilan negara⁹.

Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Menurut Kautilya tujuan utama diplomasi adalah menjamin keuntungan maksimum negara sendiri, dan kepentingan terdapan tampaknya adalah pemeliharaan

Edisi Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1995. Hlm 2

⁶ Hasyim Djalal, *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. 1990. Jakarta: CSIS, hlm 30

⁷ S.L Roy. *Diplomasi*. Edisi Kedua. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 1995. Hlm 3

⁸ *Ibid.* Hlm 8-9

⁹ *Ibid.* Hlm 4

keamanan. Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan menjamin kepentingan-kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi. Selain itu terdapat tiga cara dasar dalam pelaksanaan diplomasi suatu negara yaitu kerjasama, persuasi dan pertentangan.¹⁰ Sehingga dalam proses diplomasi suatu Negara pasti akan menjalankan tiga pelaksanaan diplomasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertahanan Indonesia diselenggarakan atas dasar keyakinan pada kekuatan sendiri. Indonesia tidak mungkin dapat menyandarkan keselamatan negara dan bangsa Indonesia kepada bangsa lain. Indonesia juga tidak berada dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain. Oleh karena itu, kemampuan penangkalan Indonesia menjadi tumpuan dalam mempertahankan diri di tengah dinamika lingkungan strategis. Pertahanan Indonesia dengan sistem pertahanan semesta dikembangkan dengan mengedepankan kemampuan penangkalan yang bertumpu pada kekuatan TNI sebagai Komponen Utama dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dalam susunan Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Penangkalan Indonesia dibangun dalam strategi pertahanan berlapis yang memadukan lapis

pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan. Lapis pertahanan militer mengandalkan kekuatan dan kemampuan TNI dengan Alutsista yang andal serta prajurit yang profesional untuk melaksanakan OMP maupun OMSP. Dalam rangka itu, TNI sebagai kekuatan bersenjata dibangun dan dikembangkan secara profesional untuk mencapai tingkat kekuatan yang mencapai standar penangkalan. Ukuran standar penangkalan adalah standar kekuatan di atas kekuatan pokok minimum yang mampu menjaga NKRI serta disegani minimal pada lingkup regional.¹¹

Upaya mewujudkan profesionalitas TNI diarahkan pada aspek pengetahuan, keterampilan dan jiwa juang prajurit TNI serta peningkatan Alutsista disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan revolusi di bidang militer. Pertahanan militer dilaksanakan TNI secara Tri-Matra Terpadu bersama-sama pertahanan nirmiliter dengan pusat kekuatan berupa dukungan rakyat atas peran TNI sebagai satu kesatuan dan totalitas pertahanan Indonesia. Sebaliknya, lapis pertahanan nirmiliter mengandalkan kemampuan dan usaha pertahanan tidak bersenjata dengan mendayagunakan faktor-faktor diplomasi dan politik, ekonomi, psikologi, sosial budaya, dan teknologi.

Amerika Serikat, Cina, Rusia, Prancis, dan Inggris merupakan Lima negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB, sampai saat ini

¹⁰Morgenthau Hans. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. Edisi kelima. 1973. Knopf. New York. Hlm 54

¹¹Kementerian Pertahanan RI. 2013. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta. Kemnterian Pertahanan RI. Hlm 66

masih menjadi kekuatan yang memiliki pengaruh besar terhadap keamanan dunia dan kawasan. juga terdapat kekuatan kolektif kawasan yang terus menunjukkan kinerjanya, seperti Uni Eropa dan ASEAN. Negara-negara di Eropa yang umumnya maju di bidang ekonomi, teknologi dan militer merupakan kekuatan kolektif dari Uni Eropa, sedangkan ASEAN sebagai kekuatan kolektif di kawasan Asia Tenggara terus berusaha membangun soliditas sesama anggota, bahkan memperluas kemitraannya dengan negara-negara di luar kawasan.

Dinamika interaksi global juga berimplikasi terhadap tantangan keamanan nasional dengan mengemukakan isu-isu keamanan baru yang berdimensi ancaman keamanan lintas negara. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas ancaman keamanan lintas negara menunjukkan angka yang cukup signifikan dan telah mengancam ketenangan dan kenyamanan hidup manusia. Perkembangan interaksi global tersebut akan mempengaruhi kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan antar negara sebagai akibat meningkatnya isu keamanan lintas negara.

Pada aspek pertahanan dan keamanan di mana perkembangan global memberikan pengaruh bentuk ancaman dengan munculnya bentuk keamanan baru yang mengutamakan penyelesaian dengan pendekatan secara komprehensif dan integratif, bentuk keamanan tersebut, antara lain, adalah terorisme, ancaman keamanan lintas negara, dan proliferasi senjata pemusnah massal. Munculnya isu keamanan baru tidak terlepas dari globalisasi, kemajuan

teknologi informasi, identitas primordial, serta penguatan peran aktor non-negara.¹² Bagi negara-negara berkembang, isu keamanan baru banyak dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang kebanyakan masih berada dalam kategori miskin, pendidikan yang rendah dan terbelakang. Perkembangan pertahanan dan keamanan global akan sangat mempengaruhi stabilitas kawasan khususnya kerjasama pertahanan dan diplomasi pertahanan antar negara.

Selain dengan negara-negara Asia Tenggara, Indonesia menjalin pula kerjasama pertahanan dengan negara-negara lain di luar kawasan Asia Tenggara. Pengembangan kerjasama pertahanan oleh Indonesia selain dimaksudkan untuk memperkuat CBM, juga ditujukan untuk membangun dan memperkuat kekuatan pertahanan Indonesia. Kerjasama pertahanan dalam bingkai diplomasi pertahanan Indonesia kinerjanya akan lebih optimal di kawasan kalau disertai dukungan peningkatan sumber daya manusia pertahanan sendiri, didukung dengan kemampuan alut sista yang baik serta dengan adanya evaluasi kebijakan kerjasama pertahanan itu sendiri. Diharapkan melalui peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia di kawasan Asia Tenggara guna mendukung diplomasi pertahanan dalam rangka mewujudkan stabilitas kawasan dapat terwujud.

A. Kerjasama Membangun Kepercayaan Bersama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam Bidang Pertahanan

¹² U.S. Department of Defense, *Annual Report to Congress: Military Power of the People's Republic of China 2009*, hal.2 10

Sejalan dengan berlangsungnya hubungan diplomatik, hubungan kerjasama militer antara Indonesia dengan Korea Selatan pun berlangsung dengan harmonis. Dimulai pada tahun 1970-an, kedua negara saling mengirimkan atase militernya.¹³ Pada tahun 1974 Korea Selatan menempatkan seorang atase militernya di Kedutaan Besar Republik Korea (KBRK) di Jakarta, sedangkan penempatan atase militer Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Seoul baru dimulai pada tahun 1979. Hubungan militer tersebut semakin meningkat sehingga pada tahun 1989 hingga 1997, Korea Selatan menunjuk pembantu atase militer untuk ditempatkan di KBRK di Jakarta. Selain itu, penempatan duta besar Indonesia di KBRI Seoul yang berasal dari latar belakang militer sedikit menunjang kelancaran hubungan militer kedua negara, disamping kebijakan TNI untuk tetap bersikap pro terhadap Korea Selatan walaupun Indonesia memegang kebijakan untuk menjalin hubungan hubungan diplomatic dengan kedua Korea (Korea Selatan dan Korea Utara).

Berkembangnya hubungan kerjasama antara kedua pemerintah di bidang kemiliteran tersebut telah memberikan efek sinergis kepada sejumlah lapisan kenegaraan tidak hanya di bidang kerjasama perekonomian, tetapi juga bidang-bidang kerjasama kemasyarakatan lainnya.¹⁴ Selama tiga dekade

terakhir Indonesia memiliki tiga pola yang berbeda dalam mendapatkan persediaan persenjataan. Pola yang pertama memiliki dua karakter utama, yakni Indonesia tidak mengalami penekanan biaya dalam pembelian peralatan militer dan Indonesia cenderung memiliki hubungan baik dengan negara-negara penyedia peralatan militer, pola ini berlangsung pada tahun 1980-an ketika Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Pola kedua juga ditandai dengan tidak adanya penekanan biaya belanja militernya, namun diikuti dengan tekanan politik dari negara-negara industri maju yang berbentuk embargo senjata (*arms embargoes*) yang dikarenakan oleh adanya isu pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, pola ini berlangsung dari tahun 1991 hingga awal tahun 1998 disaat Indonesia mengalami krisis finansial yang menyebabkan semakin sulitnya Indonesia mendapatkan peralatan senjata. Pola ketiga ditandai dengan tidak hanya berlanjutnya tekanan politik dari negara-negara utama penyuplai persenjataan (embargo), namun juga oleh semakin ditekannya biaya belanja militer oleh pemerintah sebagai dampak atas terjadinya krisis finansial yang melanda Indonesia.

Kerjasama pertahanan Indonesia yang merupakan bagian dari diplomasi pertahanan memiliki cakupan pada *CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution*.¹⁵ Hal itu menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan Indonesia

¹³ Yang Seung-Yoon, Hubungan Bilateral Korea-Indonesia Pada Era Asia Timur: Sebuah Pembahasan Dalam Perspektif Globalisasi (FISIP UI Press: 2004), hal 4.

¹⁴ Ibid., hal. 12

¹⁵<http://www.thejakartapost.com/news/2009/12/15/arf-experts-design-work-plan-preventive-diplomacy.html>, diakses pada tanggal 1 April 2012 pukul 15.10 WIB

tidak ditujukan untuk menghadapi satu atau beberapa negara tertentu yang dianggap sebagai lawan, akan tetapi ditujukan untuk menjaga stabilitas kawasan. Sebab isu-isu *CBM, preventive diplomacy dan conflict resolution* pada dasarnya sangat terkait dengan stabilitas kawasan. Dalam kondisi saat ini akan diberikan gambaran tentang kerjasama pertahanan bilateral dan multilateral dalam bentuk operasi, latihan, pendidikan, pengadaan alutsista maupun industri pertahanan. Oleh karena itu berikut ini merupakan bentuk kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Operasi Bersama

Kerjasama operasi yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam hal ini TNI dengan negara-negara lain masih relatif terbatas. Sampai saat ini, kerjasama operasi yang terjalin mencakup Patroli Terkoordinasi Indonesia-Malaysia di Selat Malaka, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Singapura di Selat Singapura, Patroli Terkoordinasi Indonesia-Filipina di Laut Sulawesi, Patroli Terkoordinasi Indonesia-India di Laut Andaman dan Patroli Terkoordinasi Indonesia-Australia di Laut Arafuru.¹⁶

Pada tanggal 23 Januari 2006 pemerintah Indonesia dan Korea Selatan yang diwakili oleh Menteri Pertahanan Kedua Negara,

Juwono Sudarsono (Indonesia) dan Yoon Kwan G-ung (Korea Selatan) membuat kesepakatan untuk meningkatkan status komite kerjasama bidang pertahanan di tingkat antar pemerintahan *Government to Government (G to G)*. Kerjasama bidang pertahanan kedua negara yang selama ini masih bersifat teknis ditingkatkan pada level pemerintah antar pemerintah kedua negara. Dengan peningkatan status tersebut maka kerjasama industri pertahanan kedua negara termasuk kerjasama dengan BUMN industri strategis seperti PT Dirgantara Indonesia (DI) dan PT PAL Indonesia akan lebih terpadu. Kesepakatan ini terjalin setelah kedua negara yang diwakili oleh Menteri Pertahanan-nya saling melakukan kunjungan dan pembicaraan dalam rangka mempererat kerjasama militer Indonesia dan Korea Selatan, khususnya bidang pengembangan industri pertahanan.

Menteri Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa kerjasama militer antara Korea dengan Indonesia sangat penting untuk lebih ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki peranan yang strategis di negara-negara Asia.¹⁷ Selain itu dilakukan pula pembahasan tentang keinginan pemerintah RI agar pemerintah Korea segera mempercepat proses penarikan sejumlah suku cadang

¹⁶

<http://www.antaraneews.com/print/1144140449/panglima-tni-kerjasama-militer-ri-australia-tetap-baik> diakses pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 19.00 WIB.

¹⁷ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, RI-KORSEL Tingkatkan Kerjasama Pertahanan dalam <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7158> diakses padatanggal 26 November 2010 pukul 19:18 wib

pesawat tempur TNI Angkatan Udara buatan Amerika Serikat jenis F-5 dan F-16 yang tertahan di Korea akibat embargo. Suku cadang tersebut selama ini diperbaiki dan akan segera dikembalikan oleh PT Samsung Industry, tempat suku cadang tersebut diperbaiki. Dan sejumlah suku cadang tersebut dikembalikan kepada Indonesia setelah dikeluarkannya pencabutan embargo oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia pada November 2005.

Pada tanggal 31 Oktober 2008, 15 TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara Korea Selatan (*Republic of Korea Air Force/ROKAF*) sepakat meningkatkan kerja sama, tidak saja dalam pertukaran siswa sekolah staf komando. Kunjungan kehormatan dari Angkatan Udara Korea Selatan ini merupakan ajang untuk meningkatkan kerja sama kedua angkatan udara. Selama ini kerja sama angkatan udara kedua negara baru sebatas pertukaran siswa sekolah staf komando TNI AU (Seskoau) dan Sekolah Staf Komando Angkatan Udara Korea Selatan.

2. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Latihan Bersama

Indonesia sejak lama telah menggagas dan melaksanakan latihan bersama dengan Angkatan Bersenjata negara-negara lain. Kalau di masa lalu kerjasama latihan bersama yang dilaksanakan oleh Indonesia lebih diutamakan pada latihan bersama dengan satu negara, sejak beberapa tahun silam Indonesia sudah terlibat aktif dalam latihan

bersama beberapa negara. Latihan bersama dilaksanakan oleh ketiga matra TNI dengan mitra masing-masing, misalnya Latma Indosin antara TNI Angkatan Laut dengan *Republic of Singapore Navy*, Elang Thainesia antara TNI Angkatan Udara dengan *Royal Thai Air Force* dan Darsasa Malindo antara TNI dengan Tentera Diraja Malaysia.

Adapun latihan bersama beberapa negara yang telah diikuti oleh TNI seperti *Cobra Gold*, Kakadu dan *RIMPAC*. Latihan rutin antara TNI dengan *Australian Defence Force (ADF)* pada ketiga matra seperti *New Horizon* dan *Rajawali Ausindo*, Latihan *CARAT* antara TNI AL dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, Latihan Darsasa Malindo antara Indonesia-Malaysia, *Passex* dan lain sebagainya adalah beberapa latihan antar negara yang dilaksanakan oleh Indonesia dengan negara-negara mitra.¹⁸ Dalam kerjasama pertahanan bentuk latihan ini masih ditemukan adanya kesalahan atau kurang pahaman proses perencanaan yang di mulai dari *Initial Planing Conference* sampai pada pelaksanaan latihan, hal ini karena kurang meratanya kemampuan personel dalam berkomunikasi atau berkoordinasi saat pelaksanaan latihan dengan menggunakan bahasa Inggris. Disisi lain evaluasi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan latihan masih belum optimal dan hanya sebagai pelengkap latihan.

Metode kedua yang dilakukan adalah melalui mekanisme

¹⁸http://indonesiandefense.blogspot.com/2010/09/melihat-pertahanan-dan-kekuatan_04.html diakses pada tanggal 01 Juli 2012 Pukul 20.00 WIB

pembelian timbal balik (*counter purchase mechanism*). Mekanisme ini terjadi sebagai ganti dari pembayaran pinjaman Indonesia untuk penyediaan peralatan militer dari Korea Selatan, dengan persetujuan bagi Indonesia untuk menyediakan 8 buah CN-235 (versi militer dan VIP) yang setara dengan nilai uang sekitar US\$ 130 juta untuk Korea Selatan. Mekanisme ini terjadi pula disaat Indonesia yang berminat untuk membeli dua kapal selam milik Korea Selatan dan Korea Selatan tertarik untuk memperoleh 12 unit CN-235- *Special Mission Operation Tactical* dan simulator pesawat CN-235 yang diproduksi PT. Dirgantara Indonesia.¹⁹ Selain itu, Korea Selatan juga menawarkan untuk menjual pesawat latih lanjutan T-50 dan KO-1 dan Indonesia sendiri menawarkan pembayaran timbal balik-nya dengan dua produk teknologi lanjutan dengan nama simulator CN-235 dan C-130 yang keduanya diproduksi oleh PT. Dirgantara Indonesia. Metode ketiga adalah melalui produksi berijin atau ijin produksi (*licensed production*). Indonesia telah melakukan kontrak untuk pembelian 4 kapal LPD (*Landing Platform Dock*) milik Korea Selatan, 2 buah akan dibangun di Korea Selatan dan 2 buah akan dibangun di Indonesia. Diharapkan dengan pembangunan 2 kapal tersebut di Indonesia akan melibatkan sebanyak mungkin produk-produk buatan Indonesia. Metode ini diduga juga akan memfasilitasi proses transfer teknologi dari Korea Selatan ke Indonesia. Maka melalui ini pula

¹⁹ Ibid. Hlm 32

yang disebutkan dalam *Joint Defense Logistic and Industry Committee* (JDLIC) yang dilakukan tiap tahun antara kedua negara menjadi mekanisme yang bermanfaat bagi kedua negara untuk bertukar informasi tentang penyediaan peralatan militer.

Metode keempat adalah melalui mekanisme pembangunan kecakapan (*capacity building mechanism*). Indonesia mengusulkan agar teknisinya dapat dilatih untuk pemeliharaan pesawat di Korea Selatan, mengingat Indonesia memiliki 3 buah pesawat KT-1. Sebaliknya, Indonesia juga melatih teknisi dari Korea Selatan untuk pemeliharaan CN-235 yang telah dibeli oleh Korea Selatan. Perjanjian pelatihan saling menguntungkan (*mutual training*) ini akan menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam pemeliharaan pesawat KT-1 dan CN-235 yang dapat dilakukan secara efisien dengan mempekerjakan teknisi lokal dari Indonesia.

3. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Pendidikan

Sedangkan untuk bidang pendidikan militer, sejak lama Indonesia telah menjalin kerjasama di bidang pendidikan militer. Dalam kerjasama itu, pada umumnya berlaku asas resiprokal di mana selain TNI mengirimkan perwira siswa untuk menempuh pendidikan militer di lembaga pendidikan negara mitra kerjasama, TNI juga menerima perwira siswa dari negara mitra itu guna mengikuti pendidikan militer di lembaga pendidikan TNI. Dewasa ini, sejumlah negara telah menjadi

mitra Indonesia dalam kerjasama pendidikan militer, seperti Amerika Serikat, Australia, sebagian negara-negara ASEAN, Cina, India, Korea Selatan dan lain sebagainya.

Terkait dengan kerjasama pendidikan itu, beberapa negara memberikan fasilitas pembiayaan khusus kepada Indonesia seperti *International Military Education and Training (IMET)* yang dibiayai oleh anggaran pertahanan Amerika Serikat. Sebagaimana kerjasama pertahanan antar negara, pada tingkat internasional terbagi antara tingkat Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Untuk tingkat Kementerian Pertahanan, kerjasama pertahanan multilateral yang selama ini dilaksanakan oleh Indonesia mencakup *ASEAN Defense Minister Meeting (ADMM)*, *ASEAN Defense Minister Meeting Plus (ADMM Plus)* dan *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Baik dalam ADMM, ADMM Plus maupun ARF, selain terdapat forum untuk pertemuan tingkat Menteri dan pejabat senior, juga terdapat sejumlah kelompok kerja (*working group*) yang membahas isu-isu keamanan seperti keamanan maritim, *humanitarian assistance and disaster relief (HADR)*, *counter terrorism*, pemeliharaan perdamaian dan lain sebagainya. Dalam kerjasama bentuk pendidikan ini masih ditemukan kemampuan personel pertahanan yang belum dapat berinteraksi dan berkoordinasi dengan baik khususnya pada level bawah. Pada saat selesai pelaksanaan kerjasama pertahanan dalam bentuk pendidikan evaluasi peserta maupun materi pendidikan masih belum dilaksanakan dengan baik.

Bentuk kerjasama pertahanan lainnya adalah pengadaan alutsista. Bila di masa lalu Indonesia dalam kerjasama ini lebih banyak sebagai negara penerima, kini Indonesia sudah pula menjadi negara pemberi/pengekspor alutsista. Pengadaan alutsista dewasa ini terjalin dengan Amerika Serikat, Belanda, Rusia, Korea Selatan dan beberapa negara lainnya. Beberapa negara lain seperti Korea Selatan, Filipina, Malaysia dan Pakistan pun sekarang telah menjadi penerima alutsista buatan Indonesia. Dewasa ini Indonesia memiliki kerjasama pertahanan hampir dengan semua negara di kawasan Asia Pasifik. Misalnya dengan Australia yang dipayungi oleh *The Lombok Agreement*, dengan Amerika Serikat yang mengacu pada *Indonesia-United States Comprehensive Partnership* dan dengan RRC yang dicakup dalam *Indonesia-PRC Strategic Partnership*.²⁰

4. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Industri Pertahanan

Kerjasama di bidang pertahanan yang pernah terjalin antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam sebuah perjanjian pengaturan pelaksanaan antara Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia dengan Kementrian Pertahanan Republik Korea tentang penerimaan bersama jaminan mutu antar pemerintah untuk material dan jasa pertahanan (*Arrangement Between*

²⁰

<http://www.kemlu.go.id/sanfrancisco/Pages/News.aspx?IDP=5544&l> diakses pada tanggal 4 Mei 2012 Pukul 17.30 WIB.

the Department of Defense and Security of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea Concerning Mutual Acceptance of Government Quality Assurance of Defense Materiel and Services) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 1999.²¹

Selain itu ditandatangani pula *Letter of Intent* mengenai kerjasama spesifik di bidang industri pertahanan antara Departemen Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Korea (*Specific Defense Industry Cooperation Between the Department of Defense of the Republic of Indonesia and the Ministry of National Defense of the Republic of Korea*) pada tanggal 22 Desember 2000 di Jakarta. Dalam melakukan kerjasama pertahanannya, Indonesia dan Korea Selatan memiliki beberapa metode. Metode pertama yang dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme pinjaman (*loan mechanism*). Selama lebih dari 10 tahun, Kementerian Pertahanan Indonesia telah menerima lebih dari US\$ 130 juta dari pinjaman yang diberikan oleh pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah Indonesia. Pinjaman yang diberikan terutama diberikan dalam bentuk fasilitas kredit ekspor yang digunakan untuk pembelian sejumlah peralatan militer seperti truk, rompi anti-peluru, detektor

ranjau, helm dan pesawat latihan KT-1.

Tabel 4.1 Pinjaman dari Korea Selatan yang Dialokasikan untuk Sektor Pertahanan Indonesia (1999-2006)

N O	Tahu n	Jumlah Pinjaman	Bentuk Pinjama n
1	1999	US\$ 7.615.226,5 0	PP & D7500 BHP OGT
2	2001	US\$ 29.251.984, 53	P7 PLTD (KT 18) & ILS
3	2003	US\$ 3.481.717,3 0	Marine Utility Vehicles
4	2003	US\$ 2.544.593,0 0	War Game System
5	2003	US\$ 3.339.910,7 5	Anti Ballistic Helmet
6	2006	US\$ 3.398.972,2 6	Purchase War Game
7	2006	US\$ 29.920.000, 00 6	Helicopt ers MI 17V-5

Sumber: Makmur Keliat, *The Future Direction of Defense Cooperation*, hal.4

Oleh karena itu, *Defense diplomacy for defense industry* dilakukan untuk pembangunan maupun penguatan industri pertahanan suatu negara, selain untuk pembangunan kapabilitas pertahanan, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi negara-

²¹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Daftar Perjanjian Internasional (Korea Selatan) dalam <http://www.deplu.go.id/Daftar%20Perjanjian%20Internasional/korea%20selatan.htm>. diakses pada tanggal 26 November 2016 pukul 23:38 wib

negara yang terlibat kerjasama. Pada tanggal 14 Mei 2007,19 Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana TNI Slamet Soebijanto di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, menyambut kedatangan kapal perang baru TNI AL, yakni KRI Makassar-590 yang dibuat dan dibeli dari Korea Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan pada sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa bentuk diplomasi Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan di bidang pertahanan adalah dengan cara membangun sistem kepercayaan bersama (*confidence building measures*) sehingga wadah pelaksanaan dari konsep ini adalah melaksanakan kerjasama dibidang militer dan pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan ini dilakukan karena adanya ancaman baik secara domestik dan internasional. Menghadapi ancaman domestik dan perubahan peta politik internasional tersebut, maka pemerintah Indonesia menggunakan konsep membangun kepercayaan bersama dengan Korea Selatan. Adapun bentuk kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan dibidang pertahanan adalah:

1. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Operasi Bersama
2. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Latihan Bersama

3. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Pendidikan
4. Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Korea Selatan dalam Bentuk Industri Pertahanan

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Hadi, Andri. 2009. *Politik Luar Negeri Indonesia: Prospek dan tantangan dalam Era Globalisasi*. 2009. Dirjen IDP Departemen Luar Negeri RI. Vol 4 No.1.

Nuchterlain, Donald E. 1979. *National Interest A new Approach*, Orbis. Vol 23. No.1 (Spring).

Saeri. M. 2012. *Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik*., Jurnal Transnasional:Vol. 3, No. 2.

Buku

D.K. Nanto, 2010. *China-North Korea Relations*. Congressional Research Service, Washington.

Djalal, Hasyim. 1990. *Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dasawarsa*. Jakarta: CSIS.

Earnest Satow Sir. 1995. *Guide to Diplomatic Practice*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

J. Nye. 2007. *Understanding International Conflicts : An Introduction to Theory and history, 6th edn*, Pearson Longman, New York.

Jemadu, Aleksius. 2007. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Graha Ilmu

- Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia. 2012. *Buku Kegiatan Tahunan dan Angka Perdagangan*. Jakarta. Kementerian Perdagangan dan perindustrian.
- Kementerian Pertahanan RI. 2013. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta. Kemnterian Pertahanan RI.
- Leifer, Michael, 2003. *Singapore's Foreign Policy: Coping with Vulnerability*. New York: Routledge.
- Makmur Keliat, 2002. *The Future Direction of Defense Cooperation*.
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Mas'oed, Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES.
- Moelino, Anton M. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Morgenthau Hans. 1973. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace. Edisi kelima*. Knopf. New York.
- Morgenthau, Hans J. 1985. *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace. Sixth edition*. New York: Alfred A. Knopf. Inc.
- Plano, Jack C. 2001. *Kamus Hubungan internasional*. Jakarta: Putra Abardin.
- Wibowo. 2002. *Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara-Negara Asia Tenggara*. Pustaka. Jakarta.
- Yang Seung-Yoon, 2004. *Hubungan Bilateral Korea-Indonesia Pada Era Asia Timur: Sebuah Pembahasan Dalam Perspektif Globalisasi*. Jakarta. FISIP UI Press.

Website

- Bastard, Perdagangan Cina ke Korea Utara Lewat Pintu Belakang (online), 15 Mei 2010, <<http://www.asiacalling.kbr68h.com/in/laporan-khusus/hubungan-korea-utara-dengan-cina/1460-chinascommercial-backdoor-to-north-korea>>, diakses tanggal 14 April 2012.
- <http://www.kompasiana.com> defenisi kamus politik. Pada tanggal 15 Juli 2012
- <http://www.republika.net>. Profil Negara Korea Selatan. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2014.
- <http://www.republika.net>. Profil Negara Korea Selatan. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2014.